



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

8. Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2029.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - n. Dinas Perhubungan;
  - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - p. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
  - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - r. Sekretariat Daerah;
  - s. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - t. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
  - u. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - v. Badan Pendapatan Daerah;
  - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- x. Inspektorat;
  - y. Kecamatan Sidikalang;
  - z. Kecamatan Sumbul;
  - aa. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
  - bb. Kecamatan Siempat Nempu;
  - cc. Kecamatan Tigalingga;
  - dd. Kecamatan Tanah Pinem;
  - ee. Kecamatan Pegagan Hilir;
  - ff. Kecamatan Parbuluan;
  - gg. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
  - hh. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
  - ii. Kecamatan Lae Parira;
  - jj. Kecamatan Gunung Sitember;
  - kk. Kecamatan Berampu;
  - ll. Kecamatan Silahisabungan;
  - mm. Kecamatan Sitinjo;
  - nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**Tabel Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					327.540.070.066		342.076.211.068		367.621.088.004		388.375.187.541		422.338.216.584	Dinas Pendidikan
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					250.447.072.211		268.222.195.043		295.295.721.693		325.029.324.915		357.191.979.011	Dinas Pendidikan
Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota (Persentase)	78,21	100	100	250.447.072.211	100	268.222.195.043	100	295.295.721.693	100	325.029.324.915	100	357.191.979.011	Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					76.852.997.855		73.554.016.025		72.125.366.311		63.025.862.626		64.846.237.573	Dinas Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	59,69	62,87	66,05	76.852.997.855	69,23	73.554.016.025	72,41	72.125.366.311	75,45	63.025.862.626	78,49	64.846.237.573	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	99,06	99,2	99,35		99,49		99,63		99,78		99,92		Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	4,34	5,02	5,7		6,39		7,07		7,75		8,43		Dinas Pendidikan
	Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus (APS) (%)	0,13	0,18	0,23		0,28		0,33		0,38		0,43		Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100.000.000		100.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan
meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan
	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	5,24	7,59	9,94		12,29		14,64		16,99		19,34		Dinas Pendidikan
	Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	33,61	39,29	44,97		50,65		56,33		62,01		67,69		Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	54,75	62,83	70,91		78,99		87,07		95,15		100		Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					40.000.000		50.000.000		0		70.000.000		0	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	44,83	54,83	64,83	40.000.000	74,83	50.000.000	84,83	0	94,83	70.000.000	100	0	Dinas Pendidikan
<b>1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>379.949.760.000</b>		<b>407.641.450.000</b>		<b>268.753.640.000</b>		<b>285.780.895.756</b>		<b>302.732.308.041</b>	Dinas Kesehatan
<b>1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>87.100.000.000</b>		<b>102.115.000.000</b>		<b>107.120.987.500</b>		<b>113.127.849.376</b>		<b>118.135.721.845</b>	Dinas Kesehatan
Persentase keterpenuhan program penunjang	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Angka)	73,95	75	77	87.000.000.000	79	102.000.000.000	81	106.994.487.500	83	112.988.699.376	85	117.982.621.845	Dinas Kesehatan
Terpenuhinya Program Penunjang sesuai Standar	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD (Nilai)	77,3	77,5	77,6	100.000.000	77,7	115.000.000	77,8	126.500.000	77,9	139.150.000	78	153.100.000	Dinas Kesehatan
<b>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					<b>287.976.960.000</b>		<b>300.584.450.000</b>		<b>156.210.125.000</b>		<b>166.710.922.504</b>		<b>178.137.356.126</b>	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	87,26	100	100	90.400.000.000	100	97.049.850.000	100	98.956.975.000	100	103.582.422.504	100	108.543.456.126	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	97,32	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	94,47	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	83,58	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	96,68	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	72,55	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	93,03	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	87,06	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	n/a	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	113,33	100	100	197.576.960.000	100	203.534.600.000	100	57.253.150.000	100	63.128.500.000	100	69.593.900.000	Dinas Kesehatan	
	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
	Cost Recovery Rate (CRR) (%)	83,81	85	85		90		90		90		90		Dinas Kesehatan	
	Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.322.800.000		4.390.000.000		4.842.527.500		5.334.123.876		5.821.230.070	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar (%)	50	61	67	300.000.000	72	315.000.000	78	329.927.500	83	346.123.876	87	363.630.070	Dinas Kesehatan	
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS (%)	89,58	100	100	4.022.800.000	100	4.075.000.000	100	4.512.600.000	100	4.988.000.000	100	5.457.600.000	Dinas Kesehatan	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					250.000.000		237.000.000		250.000.000		261.000.000		274.000.000	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman					250.000.000		237.000.000		250.000.000		261.000.000		274.000.000	Dinas Kesehatan	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					300.000.000		315.000.000		330.000.000		347.000.000		364.000.000	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					300.000.000		315.000.000		330.000.000		347.000.000		364.000.000	Dinas Kesehatan	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					103.741.644.164		107.938.324.264		111.416.472.870		116.559.803.904		118.832.208.978	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					12.145.117.964		13.380.227.964		13.280.227.964		14.280.227.964		12.681.874.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	12.145.117.964	100	13.380.227.964	100	13.280.227.964	100	14.280.227.964	100	12.681.874.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8.859.711.000		9.302.696.550		9.767.831.378		10.256.222.946		10.769.034.094	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	94,42	94,72	95,39	8.859.711.000	96,06	9.302.696.550	96,73	9.767.831.378	97,4	10.256.222.946	98,08	10.769.034.094	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	60.096	60.100	60.500	3.200.000.000	60.750	3.200.000.000	61.000	3.200.000.000	61.500	3.200.000.000	62.000	3.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	4,299	4,329	4,350	3.000.000.000	4,375	3.000.000.000	4,400	3.000.000.000	4,450	3.000.000.000	4,500	3.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.800.000.000		2.940.000.000		3.087.000.000		3.241.350.000		3.403.417.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan permukiman dan perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	20	25	30	2.800.000.000	35	2.940.000.000	40	3.087.000.000	45	3.241.350.000	50	3.403.417.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.104.000.000		1.160.000.000		1.210.000.000		1.260.000.000		1.360.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	85	125	150	1.104.000.000	175	1.160.000.000	200	1.210.000.000	225	1.260.000.000	300	1.360.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN					1.225.124.200		1.225.124.200		1.225.124.200		1.225.124.200		1.225.124.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	25	30	35	1.225.124.200	40	1.225.124.200	45	1.225.124.200	50	1.225.124.200	55	1.225.124.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					49.971.691.000		52.460.275.550		55.073.289.328		57.816.953.794		60.697.801.484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	58,43	58,5	58,55	49.971.691.000	58,6	52.460.275.550	58,65	55.073.289.328	58,7	57.816.953.794	58,75	60.697.801.484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	125	175	225	800.000.000	275	800.000.000	325	800.000.000	375	800.000.000	425	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					201.000.000		201.000.000		201.000.000		451.000.000		451.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	201.000.000	100	201.000.000	100	201.000.000	100	451.000.000	100	451.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					9.541.704.000		9.931.289.000		10.287.853.660		10.732.246.343		11.175.358.098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					200.000.000		250.000.000		250.000.000		320.000.000		370.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara, dan korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	70,12	70,2	70,3	200.000.000	70,4	250.000.000	70,5	250.000.000	70,6	320.000.000	70,7	370.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tertanganinya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	7,58	7,6	7,62	2.550.000.000	7,64	2.550.000.000	7,66	2.550.000.000	7,68	2.550.000.000	7,7	2.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS					6.791.704.000		7.131.289.000		7.487.853.660		7.862.246.343		8.255.358.098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	15,25	15,5	15,75	6.791.704.000	16,25	7.131.289.000	16,25	7.487.853.660	16,5	7.862.246.343	16,75	8.255.358.098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					27.869.474.040		30.866.471.480		31.966.023.428		34.089.415.770		35.452.127.346	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					19.062.997.540		20.971.347.330		21.051.886.863		22.390.365.549		22.976.672.104	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	88,69	89	90	12.820.000.000	92	13.497.000.000	92	14.070.000.000	93	14.573.000.000	94	14.820.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Terpenuhinya program penunjang sesuai standard	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6.242.997.540	100	7.474.347.330	100	6.981.886.863	100	7.817.365.549	100	8.156.672.104	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN LUMUM					2.116.476.500		2.475.124.150		2.754.136.565		2.739.050.221		2.995.455.242	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	97	98	98	2.116.476.500	100	2.475.124.150	100	2.754.136.565	100	2.739.050.221	100	2.995.455.242	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	41,2	41,2	41,2		45		50		55		60		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	-	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.690.000.000		5.310.000.000		5.810.000.000		6.370.000.000		6.730.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	-	80	85	2.030.000.000	90	2.310.000.000	95	2.550.000.000	100	2.780.000.000	100	3.010.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	70	75	1.260.000.000	80	1.450.000.000	85	1.610.000.000	90	1.800.000.000	95	1.930.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	-	100	100	1.400.000.000	100	1.550.000.000	100	1.650.000.000	100	1.790.000.000	100	1.790.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.000.000.000		2.110.000.000		2.350.000.000		2.590.000.000		2.750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pelayanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	600.000.000	100	560.000.000	100	650.000.000	100	760.000.000	100	800.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.400.000.000	100	1.550.000.000	100	1.700.000.000	100	1.830.000.000	100	1.950.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.435.000.000		9.085.000.000		9.735.000.000		10.385.000.000		11.035.000.000	Dinas Sosial
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.235.000.000		3.285.000.000		3.335.000.000		3.385.000.000		3.435.000.000	Dinas Sosial
Terpenuhinya program penunjang sesuai standard	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3.235.000.000	100	3.285.000.000	100	3.335.000.000	100	3.385.000.000	100	3.435.000.000	Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.300.000.000		1.500.000.000		1.700.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS (%)	100	100	100	1.300.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.900.000.000	100	2.100.000.000	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.200.000.000		1.450.000.000		1.700.000.000		1.950.000.000		2.200.000.000	Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30	1.200.000.000	30	1.450.000.000	30	1.700.000.000	30	1.950.000.000	30	2.200.000.000	Dinas Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30		30		30		30		30		Dinas Sosial
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30		30		30		30		30		Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	55	56	1.500.000.000	57	1.600.000.000	58	1.700.000.000	59	1.800.000.000	60	1.900.000.000	Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	1	2		3		4		5		6		Dinas Sosial
	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	1.000	1.000	1.500		2.000		2.500		3.000		3.500		Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	Dinas Sosial
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.203.149.866		9.260.437.853		10.286.559.258		11.571.209.726		12.646.051.021	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.096.456.866		6.706.432.553		7.377.075.808		8.114.783.388		8.926.261.728	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase Keterpenuhan Program Sesuai Standart	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6.096.456.866	100	6.706.432.553	100	7.377.075.808	100	8.114.783.388	100	8.926.261.728	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.000		301.500.000		303.007.500		304.522.538		306.045.150	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan (%)	0	0	20	300.000.000	20	301.500.000	20	303.007.500	20	304.522.538	20	306.045.150	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.165.143.000		1.546.800.300		1.830.200.450		2.298.000.750		2.474.450.788	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	100	100	1.165.143.000	100	1.546.800.300	100	1.830.200.450	100	2.298.000.750	100	2.474.450.788	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8,09	8,29	8,57	120.000.000	8,57	132.000.000	8,89	145.200.000	9,17	159.720.000	9,17	175.692.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					521.550.000		573.705.000		631.075.500		694.183.050		763.601.355	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja	32.000	32.100	32.200	521.550.000	32.350	573.705.000	32.475	631.075.500	32.600	694.183.050	33.000	763.601.355	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.272.003.750		5.273.978.000		5.406.907.450		5.438.699.450		5.501.234.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.431.503.750		4.352.228.000		4.352.957.450		4.353.849.450		4.354.734.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	4.431.503.750	100	4.352.228.000	100	4.352.957.450	100	4.353.849.450	100	4.354.734.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	55	62,5	77	200.000.000	80	200.000.000	82,5	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					240.000.000		280.000.000		320.000.000		360.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	50	51	240.000.000	53	280.000.000	55	320.000.000	57	360.000.000	60	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					20.500.000		21.750.000		23.950.000		24.850.000		26.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya kualitas keluargadalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	70,35	71,35	71,85	20.500.000	72,35	21.750.000	72,6	23.950.000	72,75	24.850.000	73	26.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	20	22	50.000.000	24	55.000.000	26	60.000.000	28	65.000.000	30	70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,09	65	68	55.000.000	70	55.000.000	71	55.000.000	72,	55.000.000	75	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					275.000.000		310.000.000		395.000.000		380.000.000		395.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	54,98	55,1	275.000.000	55,17	310.000.000	55,97	395.000.000	56,1	380.000.000	56,17	395.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	0	50	51		53		55		57		60		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16.025.593.950		17.281.593.950		17.535.593.950		18.135.593.950		18.270.593.950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					14.425.593.950		15.581.593.950		15.765.593.950		16.255.593.950		16.255.593.950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	14.425.593.950	100	15.581.593.950	100	15.765.593.950	100	16.255.593.950	100	16.255.593.950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN					1.100.000.000		1.180.000.000		1.230.000.000		1.285.000.000		1.395.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86,4	86,8	87,3	1.100.000.000	87,9	1.180.000.000	88,3	1.230.000.000	88,8	1.285.000.000	88,8	1.395.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	0	7,54	7,34		7,14		6,94		6,74		6,54		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					500.000.000		520.000.000		540.000.000		595.000.000		620.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	21,3	19	18	500.000.000	17	520.000.000	16	540.000.000	15	595.000.000	14	620.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					6.550.000.000		6.550.000.000		6.550.000.000		6.550.000.000		6.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN					6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0,25	0,5	0,75	6.000.000.000	1	6.000.000.000	1,25	6.000.000.000	1,5	6.000.000.000	1,75	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.012.517.866		20.882.282.168		22.959.630.320		25.267.561.423		27.713.003.295	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					7.374.817.866		8.080.812.168		8.888.893.320		9.777.782.723		10.755.560.995	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.374.817.866	100	8.080.812.168	100	8.888.893.320	100	9.777.782.723	100	10.755.560.995	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN					1.420.000.000		1.562.000.000		1.717.200.000		1.890.020.000		2.079.022.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	1.420.000.000	100	1.562.000.000	100	1.717.200.000	100	1.890.020.000	100	2.079.022.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.190.000.000		1.309.000.000		1.439.900.000		1.583.890.000		1.742.279.000	Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	69,5	74,61	74,81	1.190.000.000	75,01	1.309.000.000	75,21	1.439.900.000	75,41	1.583.890.000	75,61	1.742.279.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,3	83,79	83,99		84,19		84,39		84,59		84,79		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI					940.000.000		1.034.000.000		1.137.400.000		1.251.140.000		1.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	940.000.000	100	1.034.000.000	100	1.137.400.000	100	1.251.140.000	100	1.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA					70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	100	100	70.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN					110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	100	100	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN					84.700.000		93.170.000		102.487.000		112.735.700		130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	100	112.735.700	100	130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP					330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		483.153.000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	483.153.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.493.000.000		8.242.300.000		9.056.650.000		9.973.183.000		10.970.501.300	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	17,7	17,71	17,72	7.493.000.000	17,73	8.242.300.000	17,74	9.056.650.000	17,75	9.973.183.000	17,76	10.970.501.300	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN					5.870.980.843		7.780.894.784		7.758.494.784		8.099.494.784		7.812.494.784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.167.693.843		7.180.894.784		7.128.494.784		7.439.494.784		7.122.494.784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	98,33	98,33	98,33	5.167.693.843	98,33	7.180.894.784	98,33	7.128.494.784	98,33	7.439.494.784	98,33	7.122.494.784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					638.730.000		470.000.000		480.000.000		490.000.000		500.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,12	8	13	638.730.000	18	470.000.000	23	480.000.000	28	490.000.000	33	500.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	63,41	70	75		80		85		90		95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Netto) (Angka)	-0,44	-0,44	-0,44		-0,44		-0,44		-0,44		-0,44		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					59.000.000		110.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta	98	98	98,4	59.000.000	98,8	110.000.000	99,4	130.000.000	99,8	150.000.000	100	170.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	58,83	60	61		62		63		64		65		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	43,56	45	47		49		51		53		55		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	56,16	58	60		62		64		66		68		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,79	99,8	99,85		99,9		99,95		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.500.000		10.000.000			10.000.000			10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	2.500.000	100	10.000.000	100		10.000.000	100		10.000.000	100	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					3.057.000		10.000.000			10.000.000			10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	3.057.000	100	10.000.000	100		10.000.000	100		10.000.000	100	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.825.000.000		8.885.000.000			8.650.000.000			12.605.000.000	8.570.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.200.000.000		3.500.000.000			4.500.000.000			4.300.000.000	4.700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3.200.000.000	100	3.500.000.000	100		4.500.000.000	100		4.300.000.000	4.700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100.000.000		105.000.000			110.000.000			115.000.000	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	80	80	81	100.000.000	83	105.000.000	84		110.000.000	85		115.000.000	86	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					75.000.000		100.000.000			130.000.000			150.000.000	180.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	0	0	0,62	75.000.000	1,24	100.000.000	1,86		130.000.000	2,48		150.000.000	3,11	180.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					3.100.000.000		4.800.000.000			3.500.000.000			7.600.000.000	3.100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2,33	2,33	3,53	3.100.000.000	4,24	4.800.000.000	4,67		3.500.000.000	7,07		7.600.000.000	14,99	3.100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100			100		100			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA					350.000.000		380.000.000			410.000.000			440.000.000	470.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam Masyarakat Hukum adat dalam	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100	100	100	350.000.000	100	380.000.000	100		410.000.000	100		440.000.000	100	470.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.163.403.000		7.348.383.000			7.404.133.000			7.404.133.000	7.401.328.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					395.775.000		405.775.000			415.775.000			415.775.000	425.775.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terkendalinya pertumbuhan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	3,01	2,99	2,96	395.775.000	2,94	405.775.000	2,91		415.775.000	2,89		415.775.000	2,86	425.775.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7.9-	7.3-	6.7-		6.2-		5.7-		5.3-		5.1-		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	70,4	78	82,6		85,5		87,2		88,3		88,5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					5.134.328.000		5.309.308.000		5.355.058.000		5.355.058.000		5.342.253.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Perberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%)	51,81	55,81	59,81	5.134.328.000	63,81	5.309.308.000	67,81	5.355.058.000	71,81	5.355.058.000	72,81	5.342.253.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	18,98	16,98	14,98		12,98		10,98		8,98		8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	13,7	13	12,3		11,8		11,3		10,8		10,3		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	57:57	58:58	60:60		61:61		62:62		64:64		65:65		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	70	71,1	72,1		72,9		73,7		74,4		75,1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.633.300.000		1.633.300.000		1.633.300.000		1.633.300.000		1.633.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%))	57,43	59,5	61,21	1.633.300.000	63,42	1.633.300.000	65,76	1.633.300.000	67,95	1.633.300.000	69	1.633.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7.000.000.000		7.200.000.000		7.400.000.000		7.600.000.000		7.795.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.000.000.000		4.100.000.000		4.200.000.000		4.300.000.000		4.395.000.000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	4.000.000.000	100	4.100.000.000	100	4.200.000.000	100	4.300.000.000	100	4.395.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU					3.000.000.000		3.100.000.000		3.200.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	45,61	45,61	45,61	3.000.000.000	46	3.100.000.000	46,1	3.200.000.000	46,2	3.300.000.000	46,2	3.400.000.000	Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (Unit)	161	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		Dinas Perhubungan
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	50	50,1	50,2		50,3		50,4		50,5		50,6		Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN					6.639.000.000		6.986.000.000		7.237.000.000		7.586.000.000		7.670.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.065.000.000		3.156.000.000		3.220.000.000		3.286.000.000		3.315.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	66,46	68	70	3.065.000.000	72	3.156.000.000	74	3.220.000.000	76	3.286.000.000	78	3.315.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI					983.500.000		1.040.000.000		1.082.000.000		1.125.000.000		1.180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	-	65	68	983.500.000	72	1.040.000.000	73	1.082.000.000	74	1.125.000.000	75	1.180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI					2.590.500.000		2.790.000.000		2.935.000.000		3.175.000.000		3.175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Nilai)	2,69	2,8	2,85	2.590.500.000	2,9	2.790.000.000	2,95	2.935.000.000	3	3.175.000.000	3	3.175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.108.000.000		5.273.500.000		5.393.000.000		5.501.500.000		5.652.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.993.000.000		4.066.500.000		4.093.000.000		4.106.500.000		4.142.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3.993.000.000	100	4.066.500.000	100	4.093.000.000	100	4.106.500.000	1	4.142.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					300.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	500	550	600	300.000.000	650	320.000.000	700	340.000.000	750	360.000.000	800	400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					150.000.000		170.000.000		190.000.000		210.000.000		230.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	500	550	600	150.000.000	650	170.000.000	700	190.000.000	750	210.000.000	800	230.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					145.000.000		162.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	41,23	46,39	51,54	145.000.000	56,7	162.000.000	61,85	180.000.000	67,01	200.000.000	72,16	220.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,					420.000.000		445.000.000		470.000.000		495.000.000		520.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2,5	2,6	2,65	420.000.000	2,7	445.000.000	2,75	470.000.000	2,8	495.000.000	2,85	520.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2,5	2,55	2,6	100.000.000	2,65	110.000.000	2,7	120.000.000	2,75	130.000.000	2,8	140.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.550.000.000		2.850.000.000		3.325.500.000		3.763.050.000		4.186.080.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN					700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		991.595.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	13,1	13,15	700.000.000	13,2	770.000.000	13,25	847.000.000	13,3	931.700.000	13,35	991.595.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	1,18	1,74	250.000.000	2,29	275.000.000	2,79	302.500.000	3,26	332.750.000	3,68	366.025.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					650.000.000		720.000.000		900.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	650.000.000	100	720.000.000	100	900.000.000	100	1.050.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					850.000.000		935.000.000		1.076.000.000		1.198.600.000		1.328.460.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	100	850.000.000	100	935.000.000	100	1.076.000.000	100	1.198.600.000	100	1.328.460.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9.775.200.000		10.188.000.000		10.587.000.000		10.888.000.000		11.499.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.975.200.000		6.088.000.000		6.187.000.000		6.288.000.000		6.499.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	5.975.200.000	100	6.088.000.000	100	6.187.000.000	100	6.288.000.000	100	6.499.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan (%)	10,63	12	13	800.000.000	14	900.000.000	15	1.000.000.000	16	1.000.000.000	17	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3.000.000.000		3.200.000.000		3.400.000.000		3.600.000.000		4.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	14,1	15	16	3.000.000.000	17	3.200.000.000	18	3.400.000.000	19	3.600.000.000	20	4.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tercapainya kolaborasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					30.000.000		35.000.000		35.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN					30.000.000		35.000.000		35.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	200	220	30.000.000	240	35.000.000	260	35.000.000	280	50.000.000	300	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.500.000.000		1.700.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.300.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	12,5	25	30	500.000.000	35	600.000.000	40	700.000.000	45	800.000.000	50	900.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.279.515.200		4.239.000.000		4.543.000.000		5.056.000.000		5.573.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.439.000.000		3.556.000.000		3.753.000.000		4.159.000.000		4.573.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	75	75	75	3.439.000.000	75	3.556.000.000	75	3.753.000.000	75	4.159.000.000	75	4.573.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					755.515.200		598.000.000		690.000.000		782.000.000		870.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	63,12 70,23	64 71,63	65 73,07	755.515.200	70 74,53	598.000.000	73 76,02	690.000.000	75 77,54	782.000.000	75 79,09	870.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					85.000.000		85.000.000		100.000.000		115.000.000		130.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Pelestarian dan Penyelamatan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	3	85.000.000	5	85.000.000	7	100.000.000	10	115.000.000	12	130.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					265.000.000		270.000.000		315.000.000		360.000.000		332.500.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					215.000.000		210.000.000		240.000.000		270.000.000		232.500.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah pengguna, Arsip Dinamis yang tercipta dan Sumber Daya Manusia ARKD	Tingkat digitalisasi arsip (Nilai)	50,52	52	54	175.000.000	56	165.000.000	58	190.000.000	60	215.000.000	61	172.500.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	83,5	84	85	40.000.000	86	45.000.000	87	50.000.000	88	55.000.000	89	60.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					50.000.000		60.000.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Jumlah arsip daerah yang dilindungi dan diselamatkan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	66,67	66,8	67	50.000.000	68	60.000.000	69	75.000.000	70	90.000.000	71	100.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					700.000.000		950.000.000		1.150.000.000		1.350.000.000		1.550.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	71,417	83,5	84	300.000.000	84,5	400.000.000	85	500.000.000	85,5	600.000.000	86,6	700.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					400.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000		850.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.642,024	3.880,062	4.268,068	400.000.000	4.694,875	550.000.000	5.164,362	650.000.000	5.680,799	750.000.000	6.248,878	850.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.900.000.000		3.100.000.000		3.300.000.000		3.500.000.000		3.700.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	2	4	1.500.000.000	6	1.600.000.000	8	1.700.000.000	10	1.800.000.000	10	1.900.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	2	4	600.000.000	6	700.000.000	8	800.000.000	10	900.000.000	10	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	2	4	400.000.000	6	400.000.000	8	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	2	4	400.000.000	6	400.000.000	8	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					8.450.400.000		6.735.000.000		7.325.000.000		11.690.000.000		11.960.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.000.000.000		1.045.000.000		1.130.000.000		1.180.000.000		1.300.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1	1	1,35	1.000.000.000	1,7	1.045.000.000	2,05	1.130.000.000	2,4	1.180.000.000	2,75	1.300.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,88	0,88	1,38		1,88		2,38		2,88		3,38		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0	5	10		15		15		20		20		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	21.512,58	22.680,85	23.889,36		25.149,83		26.463,93		27.825,61		29.220,7		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.700.000.000		2.850.000.000		3.000.000.000		3.200.000.000		3.350.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	6.000	6.000	2.700.000.000	6.000	2.850.000.000	6.000	3.000.000.000	6.000	3.200.000.000	6.000	3.350.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT					500.000.000		600.000.000		675.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	500.000.000	1	600.000.000	1	675.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN ENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					550.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	22,37	23	24		25		26		27		28		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.700.400.000		1.690.000.000		1.920.000.000		5.910.000.000		5.910.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Cakupan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	0	30	3.700.400.000	45	1.690.000.000	60	1.920.000.000	75	5.910.000.000	75	5.910.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100			Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					730.000.000		777.000.000		924.000.000		971.000.000		1.050.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha					30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)				200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					250.000.000		270.000.000		290.000.000		310.000.000		340.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	250.000.000	100	270.000.000	100	290.000.000	100	310.000.000	100	340.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		200.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)				100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		200.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					650.000.000		750.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.150.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					600.000.000		700.000.000		850.000.000		950.000.000		1.100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	1,5	1,7	1,9	600.000.000	2	700.000.000	2,2	850.000.000	2,4	950.000.000	2,6	1.100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI														Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya pemanfaatan informasi industri														Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					39.079.350.000		39.818.550.000		41.781.830.000		43.396.552.000		48.342.479.489	Sekretariat Daerah
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					33.129.350.000		33.238.550.000		34.626.830.000		35.941.552.000		40.432.479.489	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelayanan Publik Daerah	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. (unit)	7	7	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemenuhan Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Angka)	10,58	10,83	11,08	230.000.000	11,33	260.000.000	11,58	280.000.000	11,83	300.000.000	12,08	330.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	0	0	3	300.000.000	3	310.000.000	3	320.000.000	4	330.000.000	4	340.000.000	Sekretariat Daerah
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	80	80	83	32.349.350.000	86	32.418.550.000	89	33.776.830.000	90	35.061.552.000	95	39.512.479.489	Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4.250.000.000		4.540.000.000		4.820.000.000		5.090.000.000		5.380.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	2.200.000.000	100	2.370.000.000	100	2.540.000.000	100	2.710.000.000	100	2.880.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	0	85	85	1.250.000.000	90	1.300.000.000	95	1.350.000.000	100	1.400.000.000	100	1.450.000.000	Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	70	75		80		85		90		95		Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	0	100	100	800.000.000	100	870.000.000	100	930.000.000	100	980.000.000	100	1.050.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.700.000.000		2.040.000.000		2.335.000.000		2.365.000.000		2.530.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	0	80	85	225.000.000	90	240.000.000	95	255.000.000	100	270.000.000	100	285.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	80	85	850.000.000	90	1.000.000.000	95	1.150.000.000	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	Sekretariat Daerah
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Angka)	0	0	4,24		4,26		4,28		4,3		4,31		Sekretariat Daerah
	Return On Asset (ROA) BUMD (Angka)	0	0	1		1,25		1,5		1,75		2		Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	13,33	20	20	625.000.000	25	800.000.000	30	930.000.000	35	1.045.000.000	40	1.145.000.000	Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					35.017.000.000		35.217.000.000		45.117.000.000		36.962.000.000		37.077.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					25.982.000.000		26.382.000.000		36.482.000.000		28.327.000.000		28.142.000.000	Sekretariat DPRD
Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana dengan baik	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	25.982.000.000	100	26.382.000.000	100	36.482.000.000	100	28.327.000.000	100	28.142.000.000	Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI					9.035.000.000		8.835.000.000		8.635.000.000		8.635.000.000		8.935.000.000	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	5.535.000.000	100	5.135.000.000	100	5.135.000.000	100	5.135.000.000	100	5.435.000.000	Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentas)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	3.500.000.000	100	3.700.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.360.267.200		6.344.221.600		6.365.620.600		6.368.990.600		6.373.860.600	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.637.607.000		4.617.561.400		4.634.960.400		4.634.330.400		4.635.200.400	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	0	78	80	4.637.607.000	82	4.617.561.400	84	4.634.960.400	86	4.634.330.400	88	4.635.200.400	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.097.660.200		1.097.660.200		1.097.660.200		1.097.660.200		1.097.660.200	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Keselarasn RKPd terhadap RPJMD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	100	100	100	1.097.660.200	100	1.097.660.200	100	1.097.660.200	100	1.097.660.200	100	1.097.660.200	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					625.000.000		629.000.000		633.000.000		637.000.000		641.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Keselarasn Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPd	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	625.000.000	100	629.000.000	100	633.000.000	100	637.000.000	100	641.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.02 - KEUANGAN					222.173.739.927		233.434.086.032		244.558.336.922		256.785.461.887		269.612.491.410	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.217.735.312		10.880.281.186		11.403.262.259		11.972.633.483		12.568.255.026	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6.291.202.734	100	6.755.762.871	100	7.070.323.008	100	7.416.321.160	100	7.779.656.116	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	9	9	9	3.926.532.578	9	4.124.518.315	9	4.332.939.251	9	4.556.312.323	9	4.788.598.910	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					209.659.417.460		220.142.388.333		230.625.359.206		242.156.627.167		254.264.458.525	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Penyaluran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	50,19	50,3	50,4	207.537.559.500	50,5	217.914.437.475	50,6	228.291.315.450	50,7	239.705.881.223	50,6	251.691.175.284	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	90	90	395.000.000	92	414.750.000	94	434.500.000	96	456.225.000	98	479.036.250	Badan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	1.136.911.960	100	1.193.757.558	100	1.250.603.156	100	1.313.133.314	100	1.378.789.979	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	88,78	89	89,5	339.946.000	90	356.943.300	90,5	373.940.600	91	392.637.630	91,5	412.269.512	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penggunaan Aplikasi Keuangan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	250.000.000	100	262.500.000	100	275.000.000	100	288.750.000	100	303.187.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					908.752.700		954.190.335		999.627.970		1.049.609.369		1.102.089.837	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10	10	10	908.752.700	12	954.190.335	14	999.627.970	16	1.049.609.369	18	1.102.089.837	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.387.834.455		1.457.226.178		1.530.087.487		1.606.591.868		1.677.688.022	Badan Keuangan dan Aset Daerah
tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0,0018	0,002	0,0022	1.387.834.455	0,0024	1.457.226.178	0,0026	1.530.087.487	0,0029	1.606.591.868	0,0032	1.677.688.022	Badan Pendapatan Daerah
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	88,03	88,28	88,53		89,03		89,53		90,03		90,53		Badan Pendapatan Daerah
	Rasio PAD (%)	8.39:8.40	8.41:8.42	8.43:8.44		8.45:8.46		8.47:8.48		8.49:8.50		8.51:8.52		Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.067.622.597		8.142.851.972		8.668.549.192		8.781.426.370		9.064.076.370	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.267.402.397		6.267.402.397		6.888.142.637		6.888.142.637		6.888.142.637	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	-	80	82	6.267.402.397	84	6.267.402.397	86	6.888.142.637	88	6.888.142.637	90	6.888.142.637	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.800.220.200		1.875.449.575		1.780.406.555		1.893.283.733		2.175.933.733	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75,21	76	76	1.800.220.200	77	1.875.449.575	79	1.780.406.555	79	1.893.283.733	81	2.175.933.733	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					632.942.000		670.543.555		709.643.000		738.470.731		738.470.731	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					632.942.000		670.543.555		709.643.000		738.470.731		738.470.731	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	50	55	55	632.942.000	55	670.543.555	55	709.643.000	55	738.470.731	55	738.470.731	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					640.000.000		570.000.000		660.000.000		640.000.000		620.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					360.000.000		280.000.000		360.000.000		330.000.000		300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kelibngan daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100	100	100	360.000.000	100	280.000.000	100	360.000.000	100	330.000.000	100	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					280.000.000		290.000.000		300.000.000		310.000.000		320.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	280.000.000	100	290.000.000	100	300.000.000	100	310.000.000	100	320.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					15.295.762.087		15.476.351.488		21.908.627.232		30.968.290.848		44.062.598.772	Inspektorat
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					13.567.240.087		12.679.351.488		17.863.377.232		25.377.915.848		36.440.723.772	Inspektorat
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	13.567.240.087	100	12.679.351.488	100	17.863.377.232	100	25.377.915.848	100	36.440.723.772	Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.267.140.000		2.022.000.000		2.910.250.000		3.890.375.000		5.459.375.000	Inspektorat
Persentase pengawasan internal	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	90	90	90	1.267.140.000	90	2.022.000.000	90	2.910.250.000	90	3.890.375.000	90	5.459.375.000	Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					461.382.000		775.000.000		1.135.000.000		1.700.000.000		2.162.500.000	Inspektorat
Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan (%)	100	100	100	461.382.000	100	775.000.000	100	1.135.000.000	100	1.700.000.000	100	2.162.500.000	Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					36.889.498.530		40.158.869.495		43.111.425.755		46.488.090.830		48.107.145.850	Kecamatan
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.600.445.740		35.842.988.247		38.615.998.167		41.620.136.206		43.115.839.391	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,2	84,25	84,3	1.995.680.169	84,35	2.031.528.086	84,4	2.133.104.491	84,45	2.239.759.715	84,5	2.351.747.701	Kecamatan Tanah Pinem
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80,2	80,4	80,6	1.672.831.289	80,8	2.221.890.394	81	2.549.141.629	81,2	2.925.417.022	81,2	2.925.417.022	Kecamatan Lae Parira
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	93,69	93,7	93,8	5.789.795.020	93,9	6.828.338.800	94	7.432.487.000	94,1	8.095.800.000	94,2	8.097.800.000	Kecamatan Sidikalang
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,29	84,5	84,75	2.823.081.837	84,95	3.029.487.920	85	3.332.432.612	85,25	3.665.674.273	85,5	3.665.674.273	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,29	84,5	84,75	2.009.524.463	84,95	2.220.165.334	85	2.433.128.518	85,25	2.667.314.774	85,5	2.667.314.774	Kecamatan Siempat Nempu
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	90	90,1	90,15	1.360.000.000	90,2	1.460.000.000	90,25	1.560.000.000	90,3	1.660.000.000	90,35	1.760.000.000	Kecamatan Silahisabungan
Pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,2	84,25	83,3	1.940.493.926	83,35	2.194.543.538	83,4	2.415.997.892	82,45	2.658.297.581	82,5	2.924.127.340	Kecamatan Parbuluan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,29	84,5	84,75	2.546.580.000	84,95	2.799.762.701	85	3.079.750.971	85,25	3.387.736.068	85,5	3.726.779.674	Kecamatan Sumbul
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,2	84,25	84,3	1.904.233.467	84,35	1.999.445.140	84,4	2.099.417.397	84,5	2.204.388.267	85,55	2.313.607.681	Kecamatan Tigalingga
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80,2	80,25	80,3	1.853.456.693	80,35	1.908.016.372	80,4	1.983.425.301	80,45	2.025.888.165	80,5	2.084.987.016	Kecamatan Pegagan Hilir
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80,2	80,25	80,3	1.259.717.000	80,35	1.385.688.700	80,4	1.524.257.570	80,45	1.676.683.327	80,5	1.844.351.659	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84,29	84,5	84,55	1.752.217.061	84,55	1.762.217.061	84,55	1.772.217.061	84,55	1.782.217.061	84,55	1.792.217.061	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	77	78	79	1.850.000.000	80	1.942.500.000	81	2.039.625.000	83	2.141.606.250	84	2.248.686.563	Kecamatan Gunung Sitember
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	81,2	82,3	83,2	1.379.313.860	84,25	1.547.245.246	85,6	1.701.859.770	86,6	1.872.056.748	87,6	2.036.587.672	Kecamatan Berampu
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80,2	80,25	80,3	2.463.520.955	80,35	2.512.158.955	80,4	2.559.152.955	80,45	2.617.296.955	80,5	2.676.540.955	Kecamatan Sitinjo
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.229.170.240		2.959.233.241		3.105.252.723		3.251.672.247		3.373.528.561	Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	83,2	83,6	83,4	16.601.000	85,25	18.261.100	86,6	20.087.210	87,6	22.095.931	89,6	24.305.524	Kecamatan Berampu
meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	84,2	84,25	83,3	26.700.000	83,35	32.600.000	83,4	36.240.000	82,45	40.400.000	82,5	44.440.000	Kecamatan Parbuluan
meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan					656.000.000		666.300.000		676.600.000		687.900.000		697.000.000	Kecamatan Sitinjo
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	78	79	80	40.000.000	81	42.000.000	82	44.100.000	83	46.305.000	84	48.620.250	Kecamatan Gunung Sitember
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,23	80,25	80,5	50.000.000	80,55	60.000.000	80,6	70.000.000	80,65	80.000.000	80,7	100.000.000	Kecamatan Silahisabungan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	93,69	93,7	93,8	1.007.960.980	93,9	1.008.751.700	94	1.009.541.250	94,1	1.010.411.175	94,2	1.010.411.175	Kecamatan Sidikalang
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	79,97	80	80,5	609.600.000	81	662.560.000	81,5	739.616.000	82	811.177.600	82,5	887.695.360	Kecamatan Sumbul
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	79,97	80	80,2	636.776.000	80,4	270.352.000	80,6	297.386.000	80,8	327.123.000	81	327.123.000	Kecamatan Silima Pungga-Pungga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	42.588.000	80,35	44.717.400	80,4	46.953.270	80,45	49.300.934	80,5	51.765.980	Kecamatan Tanah Pinem
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	9.633.360	80,35	10.596.696	80,4	11.656.366	80,45	12.822.002	80,5	13.000.000	Kecamatan Pegagan Hilir
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	79,97	80	80,2	5.775.000	80,4	6.352.500	80,6	6.987.500	80,8	7.686.525	81	7.686.525	Kecamatan Siempat Nempu
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	56.402.900	80,35	59.223.045	80,4	62.184.197	80,45	65.293.407	80,5	65.293.407	Kecamatan Tigalingga
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80	80,2	80,4	30.283.000	80,6	33.311.300	80,8	36.642.430	81	40.306.673	81	44.337.340	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80	88,2	80,3	28.850.000	80,35	29.200.000	80,4	30.000.000	80,45	31.000.000	80,5	32.000.000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,4	80,6	12.000.000	80,8	15.007.500	81	17.258.500	81,2	19.850.000	81,2	19.850.000	Kecamatan Lae Parira
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					811.707.800		974.467.744		1.068.031.102		1.168.902.224		1.227.133.193	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	93,69	93,7	93,8	10.000.000	93,9	20.000.000	94	30.000.000	94,1	40.000.000	94,2	40.000.000	Kecamatan Sidikalang
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	79,97	84,5	84,75	31.646.120	84,95	110.000.000	85	121.000.000	85,25	133.100.000	85,5	133.100.000	Kecamatan Siempat Nempu
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	96.098.100	80,35	100.903.005	80,4	105.948.155	80,45	111.245.563	80,5	116.807.841	Kecamatan Tanah Pinem
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	1.603.580	80,35	1.763.939	80,4	1.940.332	80,45	2.134.365	80,5	2.300.000	Kecamatan Pegagan Hilir
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80	81	82	85.000.000	83	89.250.000	84	93.712.500	85	98.398.125	86	103.318.031	Kecamatan Gunung Sitember
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,23	80,55	80,65	60.000.000	80,88	70.000.000	81	80.000.000	81,25	90.000.000	80,5	100.000.000	Kecamatan Silahisabungan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,4	80,6	62.325.000	80,8	80.362.500	81	92.417.000	81,2	106.280.000	81,2	106.280.000	Kecamatan Lae Parira

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	60.800.000	80,35	63.840.000	80,4	66.880.000	80,45	69.920.000	80,5	72.000.000	Kecamatan Sitinjo
Cakupan Layanan Kecamatan dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					31.750.000		32.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	79,97	80	80,5	81.500.000	81	89.650.000	81,5	98.615.000	82	108.476.500	82,5	119.324.150	Kecamatan Sumbul
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	79,97	80	80,2	47.044.000	80,4	51.748.000	80,6	56.922.000	80,8	62.614.000	81	62.614.000	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	65.806.000	80,35	69.096.300	80,4	72.551.115	80,45	76.178.671	80,5	76.178.671	Kecamatan Tigalingga
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	62,77	75	77,25	103.135.000	80	113.354.000	80	124.295.000	80	136.730.000	80	150.403.000	Kecamatan Parbuluan
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80,2	80,25	80,3	35.000.000	80,35	38.500.000	80,4	42.350.000	80,45	46.585.000	80,5	51.243.500	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	83,2	83,6	84,2	40.000.000	85,25	44.000.000	86,6	48.400.000	87,6	53.240.000	89,6	58.564.000	Kecamatan Berampu
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					248.174.750		382.180.263		322.143.763		447.380.153		390.644.705	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	79,97	80	80,2	2.244.000	80,4	2.468.000	80,6	2.714.000	80,8	2.986.000	81	2.986.000	Kecamatan Sidikalang
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	93,69	93,7	93,8	2.244.000	93,9	4.468.000	94	2.714.000	94,1	10.986.000	94,2	2.986.000	Kecamatan Siempat Nempu
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	79,97	80	80,5	13.000.000	81	35.300.000	81,5	38.830.000	82	42.713.000	82,5	46.984.300	Kecamatan Sumbul
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	79,97	80	80,2	5.213.000	80,4	9.733.000	80,6	6.305.000	80,8	27.000.000	81	27.000.000	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	84,2	84,25	84,3	29.573.250	84,35	31.051.913	84,4	32.604.508	84,45	34.234.734	84,5	35.946.470	Kecamatan Tanah Pinem
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus	80,2	80,25	80,3	36.000.000	80,35	37.500.000	80,4	39.000.000	80,45	40.500.000	80,5	42.000.000	Kecamatan Pegagan Hilir

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	62,77	75	77,25	3.432.000	80	3.775.000	80	4.152.720	80	4.567.992	80	5.024.791	Kecamatan Parbuluan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	80	80,2	80,4	15.000.000	80,6	36.500.000	80,8	18.150.000	81	69.965.000	81	21.961.500	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	78	79	80	22.500.000	81	48.625.000	82	24.806.250	83	41.046.563	84	28.791.126	Kecamatan Gunung Sitember
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	81	82	83	20.000.000	84	25.000.000	85	30.000.000	86	35.000.000	87	45.000.000	Kecamatan Silahisabungan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	80,2	80,25	80,3	10.000.000	80,35	10.900.000	80,4	11.800.000	80,45	12.700.000	80,5	13.500.000	Kecamatan Sitinjo
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	80,2	80,4	80,6	4.000.000	80,8	11.500.000	81	13.225.000	81,2	15.210.000	81,2	15.210.000	Kecamatan Lae Parira
Meningkatnya Layanan Kecamatan dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Meningkatnya Layanan Kecamatan Dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	80	82	84	41.060.000	86	71.060.000	88	43.113.000	90	55.268.650	92	47.532.083	Kecamatan Tigalingga
Persentase yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDDes sesuai standar	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai standar (%)	83,2	83,6	84,2	3.908.500	85,25	4.299.350	86,6	4.729.285	87,6	5.202.214	89,6	5.722.435	Kecamatan Berampu
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.515.000.000		4.986.500.000		5.485.150.000		34.663.756.543		6.637.031.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.266.384.809		2.493.023.290		2.742.325.619		3.016.558.181		3.318.213.999	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	88	90	91	2.266.384.809	92	2.493.023.290	93	2.742.325.619	94	3.016.558.181	95	3.318.213.999	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					520.747.691		572.822.460		630.104.706		693.115.177		762.426.694	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	80	82	84	520.747.691	86	572.822.460	88	630.104.706	89	693.115.177	90	762.426.694	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.029.232.500		1.137.155.750		1.250.871.325		30.006.050.000		1.513.554.303	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	90	91	92	1.029.232.500	94	1.137.155.750	96	1.250.871.325	98	30.006.050.000	100	1.513.554.303	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	90	91	92	10.000.000	94	11.000.000	96	12.100.000	98	13.310.000	100	14.641.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					610.000.000		671.000.000		738.100.000		811.910.000		893.101.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	80	82	83	610.000.000	84	671.000.000	86	738.100.000	87	811.910.000	88	893.101.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK					78.635.000		101.498.500		111.648.350		122.813.185		135.094.504	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	86	88	90	78.635.000	92	101.498.500	95	111.648.350	96	122.813.185	100	135.094.504	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.351.398.199.086		1.426.828.479.709		1.349.311.819.425		1.468.467.551.456		1.531.499.959.269	

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010